

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang membuat ICC menjalankan yurisdiksinya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia karena dugaan deportasi 200.000 anak dari Ukraina ke Rusia. Pada tanggal 17 Maret 2023 ICC menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Rusia namun dengan hasil dimana pihak Rusia menolak surat tersebut. Alasan penolakan Rusia didasarkan bahwa Rusia pertama, bukan negara pihak ICC atau negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Kedua, Rusia menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan deportasi, namun tindakan yang dilakukan adalah menyelamatkan anak-anak negara Ukraina dari wilayah Perang.

Bantahan tersebut tentu tidak diterima oleh ICC karena berdasarkan Prinsip *Willingnes* dan *Compatibility* pihak Rusia tidak mau melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yaitu Presiden Rusia dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum internasional. Berdasarkan yurisdiksi Universal, setiap negara yang termasuk negara anggota maupun bukan anggota, ICC dapat melaksanakan Yurisdiksinya berdasarkan rujukan dari PBB sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Statuta Roma 1998 serta merupakan perbuatan yang melanggar norma *Ius Cogens*. Sehingga ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut telah menggunakan dasar yang jelas dan alasan yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan

terhadap Presiden Rusia telah sesuai dengan ketentuan atas dugaan adanya perbuatan deportasi secara paksa yang dimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Statuta Roma 1998 tentang kejahatan perang utamanya deportasi secara paksa.

B. Saran

International Criminal Court seharusnya memberikan batasan yang jelas mengenai Prinsip Komplementaritas (*Complementary*) terutama penjelasan yang mendetail terkait penggunaan prinsip *Unwillingness dan Unable* yang terdapat pada pasal 17 Statuta Roma 1998. Selain itu bukan hanya penjelasannya akan tetapi juga terhadap pelaksanaan dan fakta yang terjadi di lapangan seharusnya ICC memberikan penjelasan yang adil. Untuk Rusia alangkah baiknya memperhatikan kembali alasan penolakan terhadap Surat Perintah Penangkapan utamanya yang sesuai dengan Hukum Internasional karena penggunaan prinsip *Complementary* yang menjadi dasar bisa saja menjadi boomerang yang bisa mengancam kedaulatan negara Rusia sendiri.